

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan di analisis seperti yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didapatkan beberapa hal penting yaitu:

- 1) Pemberitaan kecurangan yang ada di sektor pemerintahan Indonesia dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan yaitu dari 3254 berita pada tahun 2017 menjadi 1185 berita pada tahun 2018.
- 2) Kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah, kasus ini menjadi perhatian publik karena sepanjang tahun 2018 banyak kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK. Dari Bupati Halmahera Utara, Bupati Kutai, Walikota Kendari dan masih banyak lagi. Adanya kesempatan yang membuat para kepala daerah ini lali dalam menjalankan amanahnya, seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat justru merugikan negara dan juga masyarakat.
- 3) Gubernur Jambi Zumi Zola yang terjerat kasus korupsi, suap dan juga gratifikasi menjadi pusat perhatian wartawan sepanjang tahun 2018 karena telah merugikan negara dan juga masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup besar yakni hampir 100 milyar Rupiah. Bukan menjadi panutan yang baik Zumi justru membuat rakyat jambi kecewa. Namun setelah ditangkap kpk, akhirnya Zumi divonis hakim 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 3 bulan kurungan dalam perkara tersebut.

- 4) Bila dilihat dari distribusi berita berdasarkan daerah di Indonesia ada beberapa kota yang mengalami penurunan juga kenaikan, seperti Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 2775 berita turun menjadi 752 berita pada tahun 2018, Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 3 berita menjadi 26 berita pada tahun 2018, Maluku mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 41 berita menjadi 14 berita pada tahun 2018, Jawa Timur mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 6 berita menjadi 37 berita pada tahun 2018, Jambi mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 13 berita menjadi 39 berita dan masih banyak lagi daerah-daerah yang mengalami hal serupa.

Hasil dari studi terbatas ini dapat menunjukkan integritas yang longgar di sektor pemerintah ketika kepala departemen terlibat dalam tindak korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah efektif untuk melawan tindak kecurangan ini untuk memastikan sektor pemerintahan Indonesia diatur secara etis dan kepercayaan publik ditegakkan. Namun, hasil penelitian ini mungkin tidak digeneralisasikan karena keterbatasan jumlah sampel yang dipilih.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian yang dilakukan terdapat keterbatasan yang dihadapi, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Objek penelitian berfokus terhadap tindak kecurangan korupsi, penyalahgunaan aset, dan lain-lain.
2. Sumber data yang digunakan hanya satu surat kabar online.

3. Data yang dikumpulkan masih banyak persamaan

5.3 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka berikut ini adalah saran yang bisa peneliti sampaikan.

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan kategori tindak kecurangannya sehingga lebih spesifik dan lebih banyak yang bias ditemukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan beberapa media pemberitaan sebagai sumber datanya agar ada variasi sumber data sehingga ada perbandingan pada analisis hasil pengumpulan data yang dilakukan nantinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa meregenalisis penelitian dengan menambah periode tahun pengambilan data berita berjarak 2-3 tahun. Agar kasus-kasus yang panjang bisa dianalisis sampai.